

PERANAN APRIS DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KEUTUHAN RIS TAHUN 1949-1950

Andik Suryawan
064284012

Jurusan Pendidikan Sejarah FIS
Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan republik Indonesia setelah diadakannya perundingan antara Indonesia dan Belanda dalam konferensi meja Bundar (KMB). Dampak hasil dari KMB di bidang keamanan adalah dibentuknya APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) sebagai angkatan perang nasional RIS. Pembangunan angkatan perang dan gangguan keamanan menjadi fokus pemerintah pada masa RIS.

Latar Belakang Masalah diatas menimbulkan beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana kondisi angkatan perang/TNI sebelum diselenggarakannya KMB, bagaimana pembentukan APRIS sebagai badan pertahanan dan keamanan bagi RIS, bagaimana kedudukan struktur organisasi dan unsur-unsur yang terdapat di dalam APRIS, dan bagaimana peranan APRIS dalam menjaga stabilitas keamanan RIS tahun 1949-1950.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian sejarah. Dimulai dengan tahapan heuristik, kritik, interpretasi sampai ke tahapan historiografi. Pengumpulan sumber dilakukan di perpustakaan-perpustakaan. Sumber yang telah didapat dipilih yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Setelah itu, sumber diolah dengan penafsiran dan interpretasi, dan tahapan yang terakhir penulisan hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan angkatan perang negara Indonesia setelah pengakuan kedaulatan dan peranannya dalam menjaga stabilitas keamanan pada masa RIS. Perkembangan pembangunan angkatan perang pada masa RIS tertuju pada rasionalisasi bekas tentara KNIL yang berdampak pada reorganisasi angkatan perang. Pada masa RIS, APRIS mengadakan sejumlah gerakan operasi militer untuk menumpas beberapa pemberontakan yang terjadi agar dapat menjaga stabilitas keamanan dan jalannya pemerintahan RIS.

Kata kunci : RIS, APRIS, dan stabilitas keamanan,

ABSTRACT

At December 27, 1949, the Dutch recognized Indonesian sovereignty of the republic after the holding of talks between Indonesia and the Netherlands in the Round Table Conference (RTC). The impact of the results of the RTC in the field of security is the establishment APRIS (Armed Forces of the United Republic of Indonesia) as the national army RIS. Construction of the army and security become the focus of government interference in the RIS.

Background The statement above raises several issues, namely how the army / military before the convening of the RTC, how APRIS formation as defense and security agencies for RIS, how to position and organizational structure usnsur elements contained in APRIS, and how APRIS role in maintaining stability RIS years 1949-1950.

The method of research used in writing this thesis is a method of historical research. Starting with the stages heuristic, criticism, interpretation up to the stage of historiography. Source collection conducted in libraries. Sources that have been obtained in accordance with the study. After that, the source is processed with interpretation and interpretation, and the last stages of writing research.

The results of this study describes the development of the armed forces of Indonesia after the recognition of the sovereignty of the state and its role in maintaining security and stability in the RIS. Progress in the construction of army RIS focused on the rationalization of the former KNIL impacting army reorganization. During RIS, APRIS hold a series of military operations to crush the movement some uprising in order to maintain stability and security of the government running RIS.

Keyword : RIS, APRIS, Stability Security

A. PENDAHULUAN

Perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa Indonesia harus menghadapi berbagai rintangan. Salah satunya adalah ancaman kembalinya penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan para pemimpin negara Indonesia berjuang dalam arena diplomasi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Setelah melalui beberapa perundingan, akhirnya

bangsa Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda setelah diadakannya KMB di Belanda. Pengakuan (penyerahan) kedaulatan dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 di tiga tempat yaitu Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia berganti nama menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan tidak lagi berbentuk negara kesatuan melainkan negara federal.

Fokus pemerintah RIS setelah adanya pengakuan kedaulatan adalah masalah reorganisasi dan rasionalisasi (RERA) angkatan perang. Rera yang dilakukan dalam angkatan perang tidak lain menyangkut pembentukan struktur organisasi yang baru serta rasionalisasi bekas tentara KNIL yang dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). KNIL yang dimasukkan ke dalam APRIS akan mendapatkan status yang sama dengan anggota KNIL yang berasal dari TNI.

Masalah psikologis muncul dalam proses reorganisasi APRIS. Bekas tentara KNIL yang dimasukkan ke dalam APRIS merasakan bahwa mereka akan diberikan perlakuan yang berbeda dengan tentara APRIS yang berasal dari TNI. Permasalahan psikologis inilah yang akhirnya menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Banyak bekas tentara KNIL yang keluar dari kesatuannya dan memilih bergabung dengan para golongan federalis yang ingin mempertahankan bentuk negara federal. Pemberontakan yang dipelopori oleh golongan federal diantaranya dimulai sejak awal 1950 hingga dibubarkannya RIS. Pada awal 1950 terjadi pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang dipimpin oleh Westerling, kemudian dilanjutkan oleh pemberontakan Andi Azis yang terjadi di Makasar, dan yang terakhir adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Dr. Soumokil. Seluruh pemberontakan yang terjadi pada masa transisi RIS-RI merupakan bentuk usaha dari Belanda untuk mempertahankan bentuk federal di Indonesia. Tidak sedikit tentara KNIL yang terlibat dalam setiap pemberontakan yang terjadi.

B. KEADAAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT TAHUN 1949-1950

Setelah diadakannya KMB pada tanggal 23 Agustus 1949 – 2 November 1949, maka Belanda setuju untuk mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang berbentuk federal. Republik Indonesia Serikat yang dibentuk dengan landasan piagam pengakuan kedaulatan terdiri dari himpunan beberapa negara bagian yang diperintah oleh pemerintah RIS bersama parlemen dan senat. Wilayah RIS meliputi seluruh wilayah bekas jajahan Belanda termasuk RI yang terbagi menjadi beberapa negara bagian. Jumlah keseluruhan negara bagian yang berada di bawah kekuasaan pemerintah RIS berjumlah 16 negara bagian. Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden RIS dengan Drs. Moh. Hatta sebagai perdana menteri.

Kabinet RIS di bawah pimpinan Moh. Hatta memerintah hingga 17 Agustus 1950 setelah RIS dibubarkan. Pada masa RIS permasalahan yang dihadapi oleh kabinet perdana menteri Hatta adalah reorganisasi angkatan perang serta beberapa pemberontakan yang timbul di beberapa negara bagian yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Pada masa pemerintahan perdana menteri Hatta juga banyak terjadi gerakan – gerakan di beberapa negara bagian yang menuntut kembalinya RIS ke dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Adanya tuntutan tersebut mempercepat proses kembalinya RIS menjadi RI. Proses

pengembalian RIS menjadi RIS harus menghadapi beberapa pemberontakan yang berusaha untuk mempertahankan bentuk federal dan menentang kembalinya RIS ke RI. Pemberontakan yang terjadi juga disebabkan oleh permasalahan psikologis yang timbul pada para bekas tentara KNIL yang dimasukkan ke dalam APRIS.

Keterlibatan golongan federalis dalam setiap pemberontakan yang terjadi menjadi sebuah alasan yang kuat bahwa adanya keinginan untuk mempertahankan bentuk federal di Indonesia. Pertentangan yang terjadi antara golongan federal dan golongan *republikein* juga semakin membuat keadaan politik semakin tidak menentu. Melalui beberapa golongan federal belanda menginginkan agar kesatuan bangsa Indonesia sebagai sebuah satu kesatuan dapat dipecah belah, dengan begitu mereka lebih mudah untuk berkuasa kembali di Indonesia. Keterlibatan Belanda sebagai dalang dari semua pemberontakan yang terjadi juga dapat kita lihat, bahwa setiap pemberontakan yang terjadi pada masa KNIL selalu melibatkan bekas tentara KNIL masih berada di Indonesia.

Pemberontakan pertama yang terjadi adalah Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin oleh Raymond Pierre Westerling. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung. Pemberontakan ini didukung oleh batalyon *Reciment Speciale Troepen (RST)*, sebuah pasukan komando KNIL. Pemberontakan ini bertujuan untuk mempertahankan negara pasundan dan menjadikan APRA sebagai angkatan perangnya.

Pemberontakan kedua yang terjadi adalah pemberontakan Andi Azis di Makasar. Pemberontakan ini disebabkan oleh masalah psikologis tentara yang terjadi pada masa peleburan bekas tentara KNIL ke dalam APRIS. Pemberontakan ini bertujuan untuk mempertahankan Negara Indonesia Timur (NIT) serta menolak kehadiran pasukan APRIS yang berasal dari unsur TNI. Pemerintah pusat RIS mengirimkan pasukan tambahan dari Jawa ke wilayah NIT dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan RIS di negara bagian itu. Andi Aziz menolak rencana pemerintah tersebut dan mengadakan pemberontakan dengan menculik letkol A.Y Mokoginta yang menjadi wakil pemerintah RIS di wilayah NIT.

Pemberontakan yang ketiga yaitu gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan RMS dipimpin oleh Dr. Soumokil. Soumokil adalah mantan jaksa agung NIT. Dr. Soumokil salah satu golongan yang mendukung untuk dipertahankannya bentuk negara federal di Indonesia. Sebelum melakukan pemberontakan RMS, ia juga menghasut Andi Aziz untuk melakukan pemberontakan di Makasar dengan tujuan untuk mempertahankan bentuk Negara Indonesia Timur.

C. REORGANISASI APRIS

Reorganisasi tentara menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah RIS. Penyelesaian masalah peleburan KNIL harus dilakukan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Pemerintah RIS membentuk sebuah panitia persiapan

nasional yang diketuai oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Panitia persiapan nasional memegang kekuasaan tertinggi atas badan kepolisian dan militer. Pemerintahan militer dinyatakan tetap berlaku dalam rangka pemindahan tanggung jawab dari angkatan perang Belanda kepada APRIS. Pemindahan tanggung jawab dari angkatan perang Belanda kepada APRIS meliputi materil, personil, dan kependidikan. Setelah KNIL dibubarkan pada tanggal 26 Juli 1950, sesuai dengan hasil perjanjian KMB, maka seluruh peralatan KNIL akan diserahkan kepada APRIS. Serah terima dari angkatan perang Belanda kepada APRIS diwakilkan kepada Gubernur militer dan komandan pasukan angkatan perang Belanda. Para gubernur militer yang merangkap sebagai koordinator keamanan untuk wilayahnya masing-masing diantaranya, Kolonel Sungkono yang mewakili serah terima untuk wilayah Jawa Timur, Kolonel Gatot Subroto untuk wilayah Jawa tengah, Kolonel Sadikin untuk wilayah Jawa Barat, dan Kolonel Daan Yahya untuk wilayah Jakarta.¹ Wilayah Sumatera diwakili oleh tiga orang yang diangkat menjadi koordinator keamanan yaitu kolonel A.E Kawilarang untuk wilayah Sumatera dan Aceh, Letnan Kolonel Dahlan Djambek untuk Sumatera Utara, Riau, dan Bangka Belitung, serta Letnan Kolonel Simbolon untuk wilayah Sumatera Utara.²

Serah terima yang terjadi antara angkatan perang Belanda dan APRIS dilakukan dengan perwakilan koordinator keamanan wilayah masing-masing, kecuali untuk daerah Negara Indonesia Timur. NIT menolak dibentuknya koordinator keamanan, sehingga sebagai gantinya dibentuklah Komisi Militer dan Teritorial Indonesia Timur (KMIT). Komisi ini diketuai oleh Ir. Putuhena, dengan anggota Letnan Kolonel A.Y. Mokoginta dari unsur TNI dan Mayor Nanlohy dari tentara KNIL.³

Reorganisasi APRIS juga dihadapkan pada permasalahan psikologis tentara. Pemerintah RIS mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengatasi masalah tersebut. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah RIS bertujuan agar proses peleburan bekas tentara KNIL ke dalam APRIS dapat berjalan dengan aman dan tertib, serta tidak timbul permasalahan di Belakng hari, akan tetapi permasalahan tetap saja timbul menyangkut penyerahan dan pemasukan bekas tentara KNIL ke dalam APRIS. Permasalahan psikologis yang timbul antara bekas tentara KNIL dengan tentara APRIS yang berasal dari unsur TNI disebabkan oleh latar belakang yang berbeda diantara keduanya. TNI lahir sebagai tentara rakyat yang memperjuangkan kemerdekaan, sedangkan tentara KNIL adalah tentara yang dibentuk oleh Belanda dan bekerja di bawah

komando Belanda, maka tidak mengherankan jika pemberontakan yang terjadi pada masa RIS sebagian besar didukung oleh tentara KNIL yang dimanfaatkan oleh beberapa golongan yang ingin mempertahankan bentuk federal di Indonesia.

Pada masa RIS, APRIS menjadi angkatan perang nasional bagi RIS. APRIS melakukan penyempurnaan dalam segala bidang salah satunya dalam struktur organisasi sebagai sebuah angkatan perang. Struktur organisasi APRIS disesuaikan dengan pekerjaan yang harus mereka selesaikan pada awal tahun 1950. Penyelesaian masalah reorganisasi KNIL pada masa awal dibentuknya APRIS mempengaruhi struktur angkatan perang pada masa itu. Pada masa APRIS, struktur pemerintahan militer dinyatakan tetap berlaku. Jabatan gubernur militer bertanggung jawab atas keamanan daerah serta merangkap sebagai koordinator keamanan untuk daerah kekuasaannya. Struktur organisasi APRIS pada awal pembentukannya disesuaikan pada masalah peleburan eks KNIL ke dalam APRIS yang sebagian besar adalah Angkatan Darat.

Struktur organisasi APRIS terdiri atas Staf G, Staf A, dan Staf Q. Penetapan struktur organisasi ini didasarkan pada penetapan yang dikeluarkan oleh menteri pertahanan pada tanggal 10 Desember 1949 No. 126/MP/1949 yang menerangkan bahwa organisasi angkatan darat terdiri dari kepala staf, kepala direktorat, Inspektorat, serta pasukan sebagai berikut : Angkatan Darat terdiri dari staf G, staf A, Staf Q, direktorat pendidikan, inspektorat-inspektorat infantri dan senjata bantuan. Menteri pertahanan juga mengeluarkan penetapan mengenai pembagian wilayah RIS menjadi 11 teritorium, yang kemudian diperkecil lagi menjadi 7 Teritorium militer diantaranya ;

1. Teritorium I, berkedudukan di Medan; panglimanya kolonel Maludin Simbolon
2. Teritorium II, berkedudukan di Palembang; panglimanya kolonel Bambang Utoyo
3. Teritorium III, berkedudukan di Bandung; panglimanya kolonel Sadikin
4. Teritorium IV, berkedudukan di Semarang, panglimanya kolonel Gatot Subroto
5. Teritorium V, Berkedudukan di Malang; panglimanya kolonel Sungkono
6. Teritorium VI, berkedudukan di Banjarmasin; panglimanya Letnan kolonel Sukanda Bratamenggala
7. Teritorium VII, berkedudukan di Makasar; panglimanya letnan kolonel A.Y. Mokoginta.⁴

Reorganisasi juga terjadi pada lingkup ALRIS (Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat) dan AURIS (Angkatan Udara Republik Indonesia Serikat).

Penyusunan organisasi ALRIS didasarkan pada surat keputusan menteri pertahanan yang dikeluarkan

¹ Amrin Imran, Hayun Ugaya, Sri Suko, Tanu Suherly, 1971, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Darat*, Jakarta : Pusjarah ABRI, hlm. 49

² Ibid. hlm. 51

³ Markas Besar ABRI, 1985, *40 Tahun ABRI I : Masa Perang Kemerdekaan awal dan Masa Integrasi (1945 – 1965)*, Jakarta : Pusjarah dan Tradisi ABRI, hlm.119

⁴ Disjarahad, 1979, *Sejarah TNI AD 1945 – 1973 : Peranan TNI AD Menegakkan Negara Kesatuan RI*, Jakarta : Disjarah TNI Angkatan Darat hlm 32

pada tanggal 4 Februari 1950.⁵ Kepala Staf AL membawahi tiga orang kepala staf, yaitu Kepala Staf Operasi, Kepala Staf khusus, dan Kepala Staf Materiil yang masing – masing dijabat oleh Kolonel Adam, Letnan Kolonel R.B.N Djajadiningrat, dan letnan kolonel H.F.W. Romein. Selain tiga kepala staf KSAL juga membawahi beberapa jawatan diantaranya adalah Jawatan kesehatan, perhubungan, angkutan, pendidikan, penerbangan, dan kepolisian ranjau dan penyelaman. Angkatan Laut RIS membawahi 3 Komando Derah Maritim yaitu KDM Surabaya, KDM Belawan, dan Kedinasan kota angkatan laut Jakarta.

Reorganisasi juga terjadi di AURIS. Setelah melakukan serah terima dengan *ML*/Angkatan Udara Belanda, AURIS memiliki Markas Besar Angkatan Udara. AURIS juga harus meleburkan sebanyak 10.000 bekas tentara *ML* ke dalam AURIS. Penyusunan organisasi AURIS sendiri dilakukan setelah serah terima yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 1950. Kepala Staf Angkatan Udara membawahi komando kesatuan skuadron, kesatuan pendidikan, depot, dan juga membawahi Komando Distrik Pangkalan udara. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Inteljen Kementrian Pertahanan pada tanggal 24 Juli 1950 di pulau Jawa dibentuk 3 Komando Distrik Pangkalan Udara (PU), sedangkan di pulau Sumatera dibentuk 5 Komando PU.

D. PERANAN APRIS DALAM MENJAGA KEUTUHAN DAN STABILITAS KEA-MANAN RIS

1. Penumpasan pemberontakan APRA

Setelah menerima pengakuan kedaulatan dan menjadi negara yang berbentuk federal, RIS harus menghadapi beberapa pemberontakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan jalannya pemerintahan. beberapa Gerakan Operasi Militer dilakukan untuk menumpas pemberontakan yang terjadi.

Gerakan Operasi Militer yang pertama adalah untuk menumpas pemberontakan APRA yang terjadi di Bandung. Pemberontakan yang dipimpin oleh Piere Westerling ini terjadi di Bandung dan Jakarta. Di Bandung pemberontakan APRA melakukan penyerangan terhadap markas batalyon siliwangi sebagai pusat kekuatan militer APRIS untuk wilayah Jawa Barat. Pemberontakan APRA didukung oleh kesatuan *RST*, yaitu sebuah pasukan khusus Belanda yang berjumlah 800 personil dengan senjata lengkap. Penyerangan terhadap markas divisi siliwangi ditujukan untuk menghapus unsur APRIS dari negara pasundan dan mempertahankan bentuk negara pasundan sebagai salah satu negara federal.

Untuk menyelesaikan masalah pemberontakan APRA yang terjadi di Bandung, pemerintah RIS berusaha menyelesaikannya dengan bergerak cepat, karena adanya APRA di Bandung dinilai dapat menghambat proses

pembangunan angkatan perang yang sedang berlangsung, serta dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Setelah mendapatkan laporan mengenai pemberontakan APRA yang terjadi di Bandung, APRIS bersama polisi setempat segera bertindak untuk menumpas pemberontakan yang terjadi. Kepala staf Angkatan Perang T.B. Simatupang memerintahkan untuk mempersiapkan pasukan dari divisi siliwangi melakukan serangan balasan terhadap APRA. Penyelesaian masalah pemberontakan APRIS juga diusahakan secara diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Jakarta dengan Komisaris Tinggi kerajaan Belanda di Indonesia.

Penumpasan terhadap Gerombolan APRA juga terjadi di Jakarta, terjadi baku tembak antara tentara APRIS dan APRA di beberapa pemukiman penduduk. Penumpasan gerombolan APRA dapat berjalan dengan cepat baik di Jakarta maupun di Bandung karena pasukan APRIS mendapatkan dukungan dari rakyat yang membantu penumpasan gerombolan APRA.

2. Penumpasan pemberontakan Andi Aziz

Pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makasar pada 5 Mei 1950. Andi Aziz keluar dari kesatuannya dan melakukan penculikan terhadap letnan kolonel A.Y. Mokoginta. Tujuan dari penanwanan Letnan Kolonel A.Y Mokoginta adalah agar pemerintah pusat membatalkan pengiriman batalyon worang untuk ditempatkan di Makasar. Andi Aziz juga menyampaikan sebuah tuntutan agar bentuk Negara Indonesia Timur tetap dipertahankan. Tuntutan andi Aziz memperlihatkan bahwa ia berusaha untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. Andi Aziz terkena propaganda yang disampaikan oleh Soumokol mengenai nasib bekas tentara KNIL apabila APRIS yang berasal dari unsur TNI tiba di Makasar. Soumokol nantinya juga memiliki peran yang besar terhadap berdirinya gerakan RMS.

Setelah pemerintah mendengar terjadinya pemberontakan yang dilakukan Andi Aziz, pemerintah segera memanggil Andi Aziz untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah ia lakukan. Pemerintah memberikan waktu 4x24 jam agar Andi Aziz mau menyerahkan diri dan datang ke Jakarta. Mendengar Ultimatum yang disampaikan pemerintah melalui letkol A.Y. Mokoginta, Andi Azis bersedia untuk menyerahkan diri dan datang ke Jakarta. Setelah datang ke Jakarta Andi Aziz ditahan dan diadili di pengadilan militer di Yogyakarta.

Setelah Andi Aziz diadili bukan berarti pemberontakan yang terjadi sudah selesai, karena pasukan KNIL sering melakukan kerusuhan di Makasar. Pemerintah mengirimkan sebuah pasukan ekspedisi di bawah pimpinan letkol Kawilarang. Pasukan Ekspedisi ini mendarat bersamaan dengan batalyon Worang yang telah dikirim ke NIT sebelumnya. Setelah pasukan ekspedisi mendarat di Makasar, maka kolonel A.E Kawilarang bersama sejumlah petinggi militer yang ada di Makasar menyusun sejumlah rencana untuk menempatkan seluruh pasukan secara merata di seluruh kota Makasar. Kota Makasar Dapat diduduki oleh pasukan ekspedisi pada tanggal 20 April 1950. Setelah pasukan ekspedisi tiba di kota Makasar, rakyat

⁵ Saleh As'ad Djamhari, 1979, *Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945 – Sekarang)*, Jakarta : Pusjarah ABRI, hlm. 53

menyambut gembira atas kedatangan pasukan tersebut. Operasi militer yang dilakukan oleh pasukan ekspedisi ini juga mendapatkan bantuan dari dua buah korvet ALRIS yang berada di perairan Sulawesi.

Setelah pendaratan pasukan ekspedisi keadaan kota Makasar menjadi aman terkendali, akan tetapi masalah timbul setelah beberapa kesatuan KNIL yang berada di kota Makasar melakukan penurunan bendera merah putih dan melakukan pencoretan terhadap rumah rakyat. Pertempuran antara tentara APRIS dan KNIL pun sering terjadi. Pertempuran-pertempuran antara tentara APRIS dan KNIL disebabkan oleh provokasi yang selalu dilakukan oleh para tentara KNIL. Puncak dari pertempuran yang terjadi antara tentara APRIS dan tentara KNIL terjadi setelah tentara KNIL melakukan penyerangan terhadap markas tentara APRIS. Para tentara APRIS dengan cepat bertindak dan melakukan serangan balasan. Segenap kekuatan yang dimiliki oleh tentara APRIS dikerahkan untuk mempersempit ruang gerak tentara KNIL. Dalam waktu 3x24 jam kedudukan tentara KNIL semakin terdesak dalam barak-barak yang menjadi markas mereka.

Akhirnya pada tanggal 8 Agustus 1950 bertempat di lapangan terbang Mandai diadakan persetujuan antara kolonel A.E. Kawilarang dan perwakilan komisaris tinggi Belanda. Hasil dari persetujuan itu adalah bahwa seluruh pasukan KNIL(KL) segera ditarik dari Makasar dan seluruh perlengkapan perang yang ada diserahkan kepada APRIS.

3. Penumpasan Pemberontakan RMS

Setelah gagal mendalangi pemberontakan yang terjadi di Makasar, Soumokil mendirikan gerakan Republik Maluku Selatan di Maluku. Soumokil memproklamasikan RMS menjadi sebuah negara yang merdeka lepas dari pemerintahan RIS. Pemerintah RIS berusaha menyelesaikan pemberontakan RMS dengan jalan diplomasi, karena pemerintah RIS tidak menginginkan adanya korban jiwa lagi akibat peperangan. Pada tanggal 29 April 1950 pemerintah RIS mengirimkan sebuah delegasi untuk melakukan perundingan dengan pihak RMS. Pihak RMS menyatakan penolakannya terhadap ajakan pemerintah RIS untuk melakukan perundingan. Pemerintah RIS tetap berusaha untuk menyelesaikan masalah RMS dengan jalan perundingan, akan tetapi pihak RMS tetap pada pendiriannya untuk menentang pemerintah RIS.

Penolakan RMS untuk berunding dengan pemerintah RIS membuat pemerintah bertindak tegas dengan memrintahkan pasukan ekspedisi di bawah komando A.E. Kawilarang untuk melakukan blokade terhadap kepulauan Maluku. Blokade yang dilakukan oleh pemerintah RIS bertujuan untuk memaksa pihak RMS agar mengurungkan niatnya untuk melakukan pemberontakan, akan tetapi pihak RMS tetap pada pendirian mereka untuk lepas dari pemerintah RIS.

Gerakan Operasi Militer untuk menumpas RMS dilakukan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama dilakukan untuk menguasai pulau – pulau di sekitar Ambon. Gerakan Operasi Militer yang pertama ini dinamakan operasi malam dan operasi fajar. Operasi malam dan

operasi fajar berhasil menduduki pulau-pulau yang ada di sekitar Ambon. Gerakan operasi untuk menumpas RMS ini sering disebut dengan operasi gabungan, karena melibatkan hampir seluruh elemen yang ada di dalam angkatan perang. Setelah gerakan operasi tahap pertama berhasil menduduki pulau Buru dan Ceram, maka operasi militer tahap kedua segera dilaksanakan. Operasi militer tahap kedua dinamakan Serangan Umum Senopati.

Serangan umum Senopati dilakukan untuk menyerang pusat kekuatan RMS yang berada di Ambon. Operasi Senopati dilakukan dalam dua tahap yaitu fase I dilakukan pada tanggal 28 September 1950-2 November 1950, fase ke II dimulai tanggal 3 November 1950-sampai dikuasainya seluruh kota Ambon. Pada serangan seneopati fase I berhasil merebut sejumlah posisi penting yang menjadi markas pertahanan pasukan RMS. Kota Ambon berhasil dikuasai setelah pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Mayor Ahmad Wiranatakusumah melakukan penyerangan terhadap benteng New Victoria. Setelah Benteng New Victoria yang menjadi pusat kekuatan RMS dapat direbut, maka seluruh pulau Ambon dapat dikuasai.

Setelah dikuasainya pulau Ambon, Soumokil beserta pasukan RMS yang tersisa bersembunyi di pulau ceram selama beberapa tahun. Mereka berjuang untuk mempertahankan berdirinya RMS. Dr. Soumokil baru bisa tertangkap pada tanggal 19 Desember 1963 dan diserahkan kepada pemerintah pusat di Jakarta.

E. KESIMPULAN

Terjadinya beberapa pemberontakan pada masa RIS memberikan sebuah gambaran betapa besar peran sebuah angkatan perang dalam sebuah negara. Angkatan perang berperan penting dalam menjaga keutuhan serta menjamin jalannya pemerintahan yang sah agar diakui oleh segenap rakyat yang ada dalam suatu negara. Terwujudnya kesatuan dalam sebuah negara menjadi hal yang sangat penting dalam kelangsungan sebuah negara. Untuk mewujudkan kesatuan yang kuat maka peranan angkatan perang dalam sebuah negara tidak boleh diabaikan. Selama kurun waktu 1949-1950 menjadi sebuah bukti sejarah bahwa angkatan perang kita pernah berjaya dan memenangkan beberapa pertempuran dan para pemberontak yang ingin memecah persatuan dan kesatuan kita dalam berbangsa. Sejumlah gerakan operasi militer dikerahkan untuk menumpas pemberontakan yang terjadi sehingga satu kesatuan wilayah RIS tetap terjaga hingga kembali ke dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Amrin Imran, Hayun Ugaya, Sri Suko BA, Tanu Suherly, 1971, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Darat*, Jakarta : Pusjarah ABRI
- Crouch, Harold. 1989. *Militer dan Politik Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan
- Deliar Noer, 1990, *Mohammad Hatta : Bografi Politik*, Jakarta : LP3ES

- Disjarahad, 1979, *Sejarah TNI AD 2 (1945 – 1973) Peranan TNI AD menegakkan Negara Kesatuan RI*, Jakarta :Disjarah TNI AD
- Disjarah TNI AD, 1972, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI Angkatan Darat*, Bandung : Fa. Mahjuma
- Daska Prijadi, 1965, *Gerakan Operasi Militer II : Penumpasan “APRA” Westerling di Bandung*, Jakarta : Mega Book Store
- Hario Kecik, 2009 “Pemikiran Militer 2 Sepanjang Masa Bangsa Indonesia” Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Ide Agung Gde Agung, 1991, *Renville*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Julious Pour, 2008, *Ign. Slamet Rijadi : dari Mengusir Keimpetai sampai Menumpas RMS* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Markas Besar Angkatan Darat, 1978, *Penumpasan Pemberontakan Separatisme di Indonesia*, Jakarta : Disjarah TNI AD
- Markas Besar ABRI, 1985, *40 Tahun ABRI I : Masa Perang Kemerdekaan awal dan Masa Integrasi (1945 – 1965)*, Jakarta : Pusjarah dan Tradisi ABRI
- Marwati Djoened dkk, 1985, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta : Balai Pustaka
- Mohammad Roem, 1989, *Diplomasi : Ujung Tombak Perjuangan RI*, Jakarta : PT. Gramedia
- Nasution, Abdul Haris, 1968, *Tentara Nasional Indonesia Jilid II*, Jakarta : Seruling Masa
- _____, 1977, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 2, :Diplomasi atau Bertempur*, Bandung : Angkasa
- _____, “Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 11 : Periode KMB Bandung : Angkasa
- _____, 1983, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid II : Kenangan Masa Gerilya*, Jakarta : Gunung Agung
- Rokhmani Santoso, 1965, *Bom Waktu Kolonialis Belanda di Makasar*, Jakarta : Pusjarah Angkatan Bersenjata
- Ricklefs, M.C., 2008, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008*, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta
- Semdarn Kodam Siliwangi VI, 1968, *Siliwangi dari Masa ke Masa*, Bandung : Fakta Mahjuma
- Sandhaussen, Ulf, 1986, “*Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwifungsi ABRI*” Jakarta : LP3ES
- Suparwoto, Sugiharti, 1997, *Sejarah Indonesia Baru (1945 – 1949)*, Surabaya : University Press IKIP
- Patrik Matanasi, 2002, *Peristiwa Andi Azis : Kemelut Bekas KNIL di Sulawesi Selatan Pasca pengembalian Kedaulatan*, Yogyakarta : MedPress
- Saleh As’ad Djamhari, 1979. *Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945-Sekarang)*. Jakarta : Dephankam Pusjarah TNI
- Simatupang, T. B., 1980, “Peranan Angkatan Perang dalam Negara Pancasila yang Membangun” Jakarta : Yayasan Idayu
- _____, 1991, *Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mito*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Yahya A Muhaimin, 1982, *Perkembangan Militer dan Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta : Gajahmada University Press